



Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Dalam Pemasangan Sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)

Maulida Ibnaty Qonita

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedharto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

A country's foreign policy is the most important thing in the continuity of relations with other countries, but does not leave behind the values that apply in the domestic sphere. Policy makers need to consider domestic interests in order to set the policies. The policy of installing the Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) missile system in South Korea was determined in response to a North Korean nuclear test. However, this policy caused various negative reactions from domestic and other countries. Furthermore, negative reactions also comes from other countries such as China for several reasons of their objections. This study aims to determine the factors that cause changes in South Korea's foreign policy in the installation of the Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) missile system. This study uses the Upper-left Box Liberalism theory with an actor-centrational rationalist approach. This type of research is qualitative which aims to understand the process of changing a country's foreign policy. The results of the research are domestic interests and international restrains influence a country in establishing its foreign policy. For further research, the authors suggest discussing this case with other views or theories so that they can be seen from various perspectives. Moreover, the discussion of South Korea's policies in the installation of anti-missiles can be seen from the point of view of other countries that the authors are unable to discuss further and more detail.

Keywords: *change process, foreign policy, South Korea*

PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi di Semenanjung Korea antara Korea Selatan dan Korea Utara masih terus berlangsung. Korea Utara sebagai salah satu negara yang memiliki senjata pemusnah massal membuat beberapa negara tetangganya merasa tidak aman. Korea Selatan menjadi negara yang paling merasa tidak aman karena letaknya yang bersebelahan langsung dengan Korea Utara. Selain itu, dilihat dari sejarah rivalitas kedua negara memang sudah lama terjadi. Rudal yang dimiliki oleh Korea Utara sering diujicobakan sehingga membuat ancaman keamanan yang baru bagi negara-negara tetangganya. Salah satunya Korea Selatan yang berinisiatif untuk memasang sistem anti-rudal sebagai penghalau senjata pemusnah massal Korea Utara.

Maka dari itu, Korea Selatan bekerja sama dengan Amerika Serikat memasang sistem THAAD di wilayah Korea Selatan. Pemasangan sistem anti-rudal tersebut sebagai alat pertahanan untuk keamanan wilayah Korea Selatan dan melindungi penduduknya, serta mencegah rudal milik

Korea Utara memasuki wilayah Korea Selatan. Tindakan Korea Selatan tersebut mendapat reaksi negatif dari domestik dan internasional. Dalam ranah domestik, muncul reaksi negatif dari para warga sekitar lokasi THAAD karena merasa terganggu dengan proses pemasangan sistem tersebut. Tidak hanya itu, beberapa kelompok masyarakat juga mengutarakan penolakan dalam pemasangan THAAD dengan berbagai alasan seperti alasan politik, sosial, maupun ekonomi.

THAAD berlokasi di kecamatan Seongsan, kabupaten Seongju, provinsi Gyeongsang Utara. Karena letaknya yang berada di bekas lapangan golf, lokasi tersebut sangat berdekatan dengan pemukiman warga. Para warga sekitar lokasi tidak menyetujui pemasangan THAAD karena beberapa hal, salah satunya adalah pemasangan THAAD menimbulkan polusi suara. Selain itu, karena pemasangan membutuhkan beberapa alat berat, jalanan di sekitar lokasi menjadi rusak. Reaksi penolakan juga muncul dari luar negara Korea Selatan. Cina yang menjadi tetangga Korea Selatan merasa akan mengganggu kepentingan keamanan regionalnya. Bahkan sebelum diskusi resmi THAAD dimulai, Cina menyatakan penentangannya mengenai instalasi sistem tersebut. Meskipun Cina juga menentang pengembangan nuklir Korea Utara, THAAD dianggap sebagai upaya untuk melemahkan kepentingan strategis Cina di wilayah tersebut. Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama adalah ketakutan Cina bahwa THAAD bisa digunakan untuk mencegah rudal dan mata-matai Cina di wilayahnya. Baik Amerika Serikat dan Korea Selatan telah membantah ini dengan menyatakan bahwa THAAD hanya akan digunakan melawan Korea Utara (Klingner, 2015).

Menurut Mark Tokola, Vice President dari Korea Economic Institute of America mengatakan bahwa sistem radar THAAD dapat digunakan untuk memata-matai aktivitas Cina, daripada memantau rudal masuk dari Korea Utara (Hancocks & Berlinger, 2017) (Hancocks & Berlinger, 2017). Kekhawatiran selanjutnya bagi Cina adalah fakta bahwa, melalui penyebaran THAAD Korea Selatan akan memiliki komitmen jangka panjang dengan Amerika Serikat sehingga memperkuat kehadirannya di Asia Timur Laut. Dalam konteks ini, Tiongkok juga prihatin tentang keamanan yang lebih kuat aliansi antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang, yang menimbulkan kekhawatiran akan pertahanan Cina (THAAD on the Korean Peninsula, 2017).

Cina telah meminta Korea Selatan untuk menolak instalasi THAAD, namun Korea Selatan tetap menyetujui instalasi sistem tersebut. Menanggapi penolakan tersebut, Cina menekan Korea Selatan secara diplomatik dan ekonomi. Bahkan, dalam beberapa kesempatan Cina membatalkan pertemuan pemerintah (Easley, 2017). Selain itu, dengan memanfaatkan kekuatannya melakukan pembatasan dan boikot secara sepihak terhadap usaha bisnis, serta melarang biro wisata berkunjung ke Korea Selatan. Tidak hanya itu, pada Maret 2017 Cina juga melarang masuknya hiburan dan industri mobil Korea Selatan dengan sanksi tidak resmi. Konglomerat Korea Selatan Lotte, yang memasok lahan untuk instalasi THAAD telah sangat terpengaruh. Pemerintah Cina menutup sementara 75 toko Lotte di seluruh Cina (Zhang, 2017). Akan tetapi, hubungan antara kedua negara terlihat membaik pada awal tahun 2017. Hal ini disebabkan karena proses perjanjian THAAD antara Amerika Serikat-Korea Selatan mengalami hambatan. Korea Selatan menyatakan keberatan untuk masalah biaya pemasangan THAAD yang dibebankan. Percepatan instalasi pada bulan Maret 2017 berikutnya telah membuat hubungan kembali memburuk.

Karena beberapa protes yang muncul dari domestik dan internasional tersebut, membuat pemerintah Korea Selatan mempertimbangkan kebijakan yang baik dalam pemasangan THAAD. Kerja sama Korea Selatan – Amerika Serikat dalam pemasangan THAAD disetujui oleh Presiden Park Geun-hye saat masa jabatannya. Pada perjalanan kepemimpinannya, Presiden Park Geun-hye dimakzulkan karena terlibat dalam skandal korupsi. Presiden Moon Jae-in terpilih menjadi

presiden selanjutnya. Dalam visi dan misinya, perdamaian dengan Korea Utara dan perdamaian regional sangat penting bagi Presiden Moon Jae-in. Pada awal masa kepresidennya masalah yang ditimbulkan dari pemasangan sistem THAAD di Seongju, Korea Selatan menjadi *concern* utama.

Presiden Moon Jae-in menengguhkan pemasangan THAAD karena adanya permasalahan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Diberitakan CNN Indonesia seorang pejabat Gedung Biru mengatakan (Suastha, 2017), “Tidak perlu menarik dua pelontar [THAAD] yang telah dikerahkan. Namun, penempatan pelontar baru baru boleh dilakukan hanya setelah penilaian dampak lingkungan selesai. Kami tak melihat pengerahan instrumen THAAD ini mendesak”. Empat dari enam sistem THAAD tambahan akan dikerahkan di pangkalan militer Amerika Serikat di Korea Selatan. Namun belum boleh dilanjutkan sampai waktu yang tidak ditentukan hingga penilaian dampak lingkungan selesai dan hubungan dengan negara lain terutama dalam satu regional membaik.

Penelitian ini memiliki tujuan memahami proses perubahan kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam pemasangan sistem keamanan anti-rudal. Pemahaman proses perubahan dijabarkan dengan penelusuran rangkaian kejadian. Dalam menganalisis proses perubahan kebijakan luar negeri Korea Selatan mengenai pemasangan THAAD, penulis menggunakan *Decision-making Theory* oleh Snyder dkk. Pembuatan keputusan yang dikemukakan oleh Snyder dkk dalam Rosenau (1961) adalah salah satu cara metodologis untuk menerapkan batasan negara untuk bertindak menanggapi suatu permasalahan yang terjadi (Snyder, Bruck, & Sapin, 1961).

PEMBAHASAN

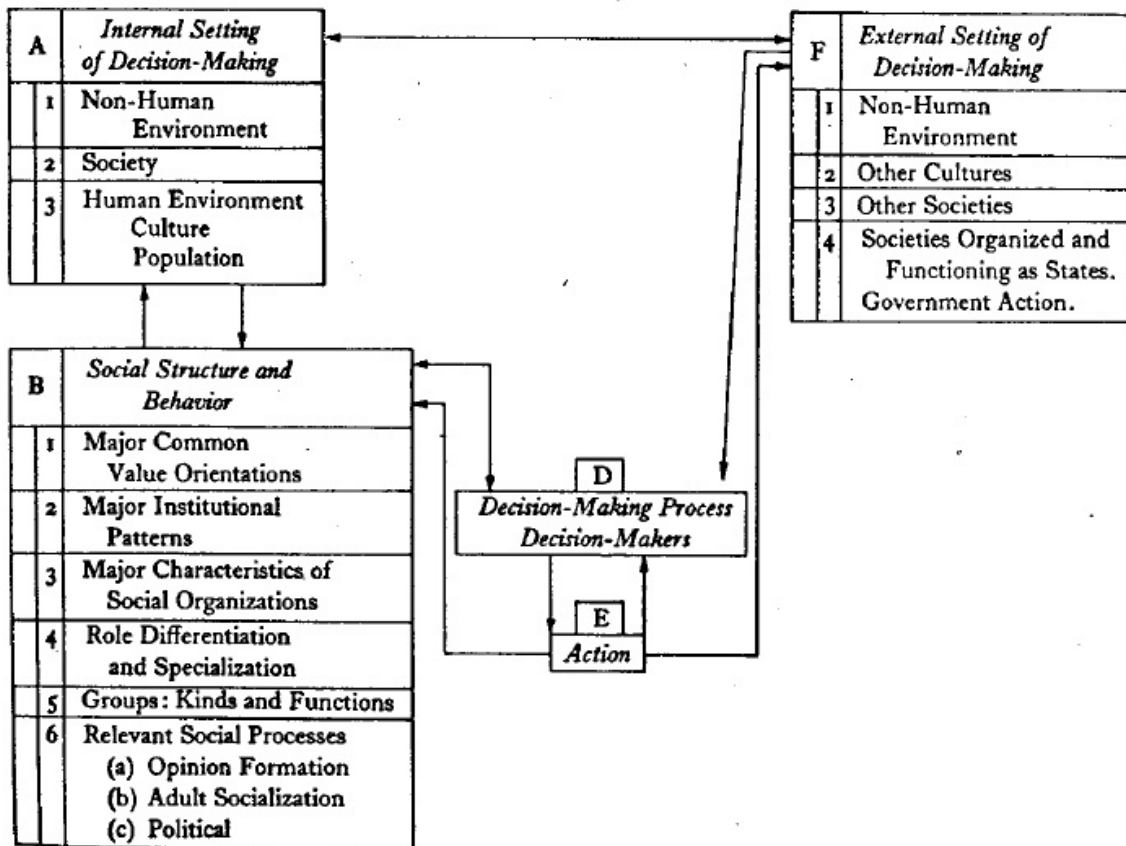
Dari kegiatan pembuatan keputusan, dapat dipahami perilaku negara tersebut dalam ranah internasional. *Decision-making* memiliki struktur dan ruang lingkup pada sistem domestik (*internal*) dan sistem internasional (*external*) yang harus di pertimbangkan oleh negara. Faktor interaksi internal dan eksternal akan membentuk preferensi negara pada pembuatan kebijakan luar negeri. Faktor internal lebih menekankan pada hubungan masyarakat dengan negara, sedangkan faktor eksternal lebih menekankan struktur internasional seperti hubungan dengan negara lain serta situasi dunia. Selanjutnya, Snyder juga mengemukakan dua aspek penting dalam proses pengambilan keputusan, yaitu: *internal setting* dan *external setting* (Snyder, Bruck, & Sapin, 1961).

Aspek pertama dalam skema di atas terdiri dari beberapa faktor-faktor internal dalam pembuatan keputusan suatu negara. *Non-human environment* merupakan lingkungan infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan masyarakat dan tempat tinggal yang berada di dalam suatu negara. *Society* merupakan masyarakat yang tinggal di dalam *environment* menjadi aktor penggerak kehidupan. Maka faktor ini sangat berpengaruh dalam pembuatan keputusan. *Human environment* merupakan lingkungan masyarakat yang terbentuk dari akibat hubungan individu dengan individu lain dan meluas menjadi hubungan kelompok. Lingkungan tersebut antara lain adalah populasi dan budaya. Tak hanya itu, dalam perkembangan studi politik internasional yang lebih maju dapat ditambahkan tipologi negara berdasarkan: organisasi politik, *range* sistem pembuatan keputusan, kekuatan dan kelemahan sistem pembuatan keputusan, serta jenis strategi kebijakan luar negeri yang digunakan. Faktor-faktor tersebut yang menjadi perbedaan satu negara dengan negara lain dalam analisis perilaku negara-negara.

Aspek kedua dalam skema merupakan struktur sosial dan perilaku negara yang dipengaruhi oleh enam faktor. Pertama yaitu orientasi nilai umum utama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat. Kedua, pola kelembagaan yang dilihat dari sebagian besar lembaga-lembaga dalam

suatu negara. Ketiga, karakteristik organisasi sosial dapat dilihat dari sebagian besar organisasi sosial yang seringnya menjadi wadah aspirasi masyarakat. Keempat, diferensiasi dan pegkhususan peran dari setiap jabatan yang menjalankan kehidupan politik negara. Kelima, kelompok-kelompok yang jenis dan fungsinya memiliki pengaruh besar dalam kelangsungan politik negara. Keenam, proses sosial yang bersangkutan dengan kelangsungan politik negara. Proses tersebut meliputi susunan informasi yang berputar dalam suatu negara mengenai isu atau fenomena. Tak hanya itu, sosialisasi yang dilakukan oleh para orang dewasa juga mempengaruhi pembuatan keputusan karena merupakan suara-suara yang sudah legal dan patut diperhitungkan. Terakhir, kehidupan politik negara yang memiliki pengaruh besar dalam pembuatan keputusan suatu negara.

Dua aspek tersebut berada di kolom aspek pertama dalam skema proses pembuatan keputusan berikut:



Sumber: Snyder dkk dalam Rosenau, 1961

Dari penjelasan di atas, aspek pertama dan kedua saling terkait dan mempengaruhi yang pada akhirnya menghasilkan putusan untuk pembuatan keputusan yang dilakukan oleh negara. Negara dalam menghadapi suatu isu dianggap sebagai aktor yang akan menangani masalah tersebut. Tindakan negara tersebut didasarkan pada keputusan dan suara kolektif yang telah diambil dari berbagai lapisan masyarakat, kelompok, dan lembaga. Pada dasarnya, tindakan ada ketika komponen-komponen berikut dapat dipastikan: aktor, tujuan, maksud, dan situasinya (Snyder, Bruck, & Sapin, 1961, hal. 202). Situasi didefinisikan oleh aktor yang terhubung dengan aktor lain untuk mengarah ke kemungkinan maksud dan tujuan bersama. Maksud dan tujuan

bersama tersebut yang dibentuk menjadi sebuah strategi tindakan namun tetap relevan dengan faktor-faktor dalam situasi yang terjadi.

Tindakan atau perilaku negara merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama negara. Termasuk tindakan yang dilakukan oleh para pembuat keputusan. Keputusan yang diambil oleh negara diambil dari bagaimana para pembuat keputusan melihat suatu masalah. Hal ini membuat suatu masalah dapat diartikan secara kurang objektif. Untuk dapat fokus ke aktor individual yang tergabung dalam pembuatan keputusan, diperlukan sebuah pusat untuk menganalisis perilaku para aktor tersebut. Namun dari skema di atas, sudah cukup dijelaskan bahwa tindakan negara diambil dari berbagai sumber tindakan yang subjektif. Pada aspek kelima, yaitu faktor eksternal dari pembuatan keputusan terdiri dari empat hal. Pertama *non-human environment* dari luar merupakan lingkungan infrastruktur negara lain yang kemungkinan mendapat dampak signifikan. Lalu ada budaya dan masyarakat negara lain yang kemungkinan dampaknya sangat terpengaruh oleh pembuatan keputusan. Terakhir, dampak pembuatan keputusan terhadap fungsi dan reaksi negara lain.

Analisis proses perubahan kebijakan luar negeri Korea Selatan mengenai THAAD

Rencana pemasangan sistem THAAD di daerah Seongju, Korea Selatan mendapat pertentangan dari penduduk setempat. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pertahanan Nasional Korea menjelaskan bahwa sistem THAAD akan diletakkan ke bekas lapangan golf sipil, tetapi terletak di daerah yang lebih tinggi. Berdasarkan Status Perjanjian Kekuatan atau *Status of Forces Agreement* (SOFA) milik Amerika Serikat - Korea Selatan, penyebaran sistem THAAD dijadwalkan akan selesai pada pertengahan 2017. Peluncuran THAAD yang tiba-tiba diumumkan oleh Presiden Park Geunhye telah membagi opini publik di Korea Selatan.

Menurut survei pendapat media Gallup Korea pada bulan Juli 2016, 50% responden mendukung keputusan tersebut sementara 32% menentang (Yonhap News Agency, 2016). Masyarakat mengutamakan keamanan dan keselamatan nasional sebagai salah satu pertimbangan utama, namun mereka khawatir keputusan itu akan berdampak negatif terhadap hubungan negara Korea Selatan dengan Cina dan Rusia. Beberapa responden survei ini juga menyatakan keenggannya untuk semakin bergantung pada militer Amerika Serikat. Karena keputusan yang diambil itu bukan merupakan pembahasan pada proses ratifikasi di Majelis Nasional Korea Selatan. Beberapa kriteria dinilai telah dibuat di luar perencanaan 'Mutual Defense Treatments' antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (Kim, 2016).

Pada tanggal 14-16 Agustus 2016, masyarakat Korea Selatan yang tidak menyetujui pemasangan THAAD melakukan protes di dekat pos utama Markas Besar Angkatan Darat Amerika Serikat dan Komando Pasukan Gabungan Korea Selatan – Amerika Serikat yang berlokasi di Yongsan, Seoul. Protes dilakukan untuk menolak pemasangan sistem THAAD di daerah Seongju, Korea Selatan. Setelah pemakzulan Presiden Park Geun-hye yang dikarenakan skandal korupsi, THAAD menjadi salah satu isu utama dalam proses pemilihan presiden yang diadakan pada Mei 2017. Pemenang pemilihan presiden tersebut, Moon Jae-in dari Partai Demokrat, berkampanye untuk keberlangsungan peluncuran THAAD yang akan dievaluasi lebih lanjut tentang manfaat dan dampak yang akan ditimbulkannya. Presiden Moon Jae-in telah lebih dulu berniat untuk meningkatkan hubungan internasional Korea melalui kebijakan yang berorientasi pada perjanjian. Namun, ia juga mengklaim bahwa THAAD akan "tidak dapat dihindari" apabila Korea Utara melakukan uji coba nuklir yang keenam kalinya (Diaz & Zhang, 2017). Korea Utara yang kemudian memberi tanggapan dan sebagai gantinya menyatakan uji coba rudal dan nuklir THAAD berikutnya telah mengakibatkan Presiden Moon Jae-in memilih menangal dari kebutuhan nasional.

Beberapa kritik yang paling keras mengenai THAAD adalah di Seongju, Gyeongsang Utara, tempat sistem tersebut dibangun dan digunakan. Walaupun Korea Selatan yang secara tradisional konservatif, beranggapan bahwa kurangnya konsultasi mengenai keputusan untuk menerapkan sistem tersebut telah dianggap tidak demokratis (Kim, 2017). Beberapa alasan yang dinilai keputusan pemerintah Korea Selatan tidak demokratis. Pertama, Gubernur wilayah tersebut juga menyatakan bahwa dia baru mengetahui keputusan itu melalui laporan awak media. Alasan kedua, penduduk terus-menerus menyatakan ketidakpuasan mereka karena masalah kesehatan yang terpengaruhi karena radiasi dan hilangnya lahan yang diakibatkan oleh proses pemasangan THAAD. Ketiga, ada kekhawatiran bahwa akan ada peningkatan perilaku anti-sosial yang terjadi di sekitar pangkalan militer Amerika Serikat lainnya yang berada di Korea Selatan. Terakhir, ada pula kekhawatiran bahwa kehadiran THAAD akan membuat wilayah Seongju menjadi sasaran militer.

Pada 30 September 2016, Amerika Serikat dan Korea Selatan mengumumkan relokasi instalasi THAAD ke Lotte Skyhill Seongju Country Club. Letaknya lebih jauh dari daerah pemukiman kota dan juga memiliki ketinggian yang lebih tinggi untuk meredakan kekhawatiran masyarakat. Namun, protes terus berlanjut dengan ratusan orang mendirikan perkemahan di dekat lokasi THAAD yang didukung oleh berbagai partai sayap kiri, termasuk Partai Buruh dan Partai Hijau. Pada 8 Mei 2017, ratusan penduduk di dekat Country Club mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan keputusan pengadilan terhadap pembangunan dan pengoperasian THAAD. Pada tanggal 6 September 2017, ketika komponen akhir dari instalasi THAAD tiba di Seongju untuk dipasang, ratusan pemrotes berusaha memblokir jalan ke lokasi dimana komponen tersebut akan dipasang.

Sebelum diskusi resmi mengenai sistem THAAD antara Korea Selatan dan Amerika Serikat dimulai, Cina telah menyatakan penentangannya mengenai pemasangan sistem tersebut. Pemasangan sistem THAAD dianggap sebagai upaya untuk melemahkan kepentingan strategis Cina di wilayah Asia Timur. Ada beberapa alasan mengenai anggapan tersebut. Pertama adalah ketakutan Cina bahwa THAAD bisa digunakan untuk menghalau rudal miliknya dan digunakan sebagai pengintai. Namun, Amerika Serikat dan Korea Selatan telah membantah anggapan tersebut dengan menyatakan bahwa THAAD hanya akan digunakan melawan Korea Utara (Klingner, 2015). Baterai THAAD akan ditempatkan di terminal mode, sehingga membuatnya tidak dapat mendeteksi Intercontinental Ballistic Missiles (ICBM) milik Cina. Meskipun rudal THAAD tidak akan mampu mencegah ICBM Cina dalam fase mid-range, informasi bisa ditransfer ke radar peringatan dini di Clear Air Force Station di Alaska, Amerika Serikat.

Kedua adalah radar THAAD yang telah ditempatkan di Jepang sudah menjadi kekhawatiran bagi Cina. Pemasangan sistem penghalau rudal di Korea Selatan menambah kekhawatiran karena letak radar 1000 km lebih dekat ke perbatasan Cina sehingga memiliki kemungkinan deteksi lebih tepat. Kekhawatiran lain adalah fakta bahwa melalui penyebaran THAAD, Korea Selatan akan memiliki komitmen jangka panjang dengan Amerika Serikat sehingga memperkuat kehadirannya di Asia Timur. Cina juga khawatir tentang persekutuan antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang akan menjadi lebih kuat yang menimbulkan kekhawatiran akan pertahanan nasional.

Reaksi Cina terhadap keputusan Korea Selatan untuk menggunakan sistem THAAD sangat negatif. Pada bulan Februari 2016, setelah diumumkan kesepakatan Korea Selatan dan Amerika Serikat secara resmi, Wakil Menteri Luar Negeri Liu Zhenmin mengadakan pertemuan darurat dengan duta besar Republik Korea Kim Jang-soo dan menyampaikan bahwa Cina menentang kesepakatan yang telah dilakukan (Ministry of Foreign Affairs of the People's

Republic of China, 2016). Setelah pernyataan tersebut, Cina melakukan tindakan yang lebih dari sekadar protes. Setelah keputusan diumumkan, Kementerian Pertahanan Nasional Cina menunda diskusi mengenai pertahanan tingkat tinggi dengan Korea Selatan dan menunda kunjungan Menteri Pertahanan Korea Selatan ke Cina (Maeil Gyeongje, 2016). Pemerintah Cina tidak mengirim pejabat tingkat tinggi sebagai tamu utama untuk menghadiri acara Hari Nasional tahunan kedutaan Korea Selatan pada tahun 2016 (Young-jun, 2016). Selain melakukan berbagai tindakan tersebut sebagai tanggapan, Cina juga memanfaatkan kekuatan ekonominya untuk melakukan boikot di sektor ekonomi. Boikot dilakukan yang dilakukan mencakup perdagangan tingkat retail dan toko *duty-free*, barang setengah jadi, travel wisata, dan budaya pop.

Administrasi Pariwisata Nasional Cina mengeluarkan instruksi untuk mengurangi jumlah wisatawan Cina ke Korea Selatan sebesar 20% (Young-jun, 2016). Dampak yang diterima oleh Korea Selatan pasca pengurangan wisatawan cukup besar. Dampak tersebut dimulai ketika *China National Tourism Administration* (CNTA) mengedarkan tujuh garis panduan tentang berpergian ke Korea Selatan pada 2 Maret 2017. Hal ini dilakukan oleh Cina untuk memberi sanksi kepada Korea Selatan karena telah memasang THAAD.

Dalam panduan berwisata tersebut berisikan poin-poin yang mengatur wisata ke Korea Selatan, yaitu: (1) *Stop sales of group travel to Korea (after March 15)*, CNTA mengedarkan kabar kepada agen-agen travel untuk menghentikan penjualan tiket secara kolektif ke negara Korea Selatan; (2) *Abolition of personal travel business to Korea*, pembatalan tiket-tiket perjalanan bisnis pribadi ke negara Korea Selatan; (3) *Mark or remove all Korean related items as sold out*, menandai atau menyingkirkan produk-produk yang berkaitan dengan negara Korea Selatan telah habis terjual; (4) *All Lotte Corporation related travel products*, segala macam produk yang di produksi serta dipasarkan oleh korporasi Lotte dilarang untuk dipasarkan, (5) *Elimination of low-cost travel in Korea*, penghapusan tiket-tiket perjalanan ke Korea Selatan yang murah dan menjadi salah satu jalan agar turis-turis Cina dapat berwisata ke Korea Selatan; (6) *Cruise ships not allowed to berth in Korean port*, kapal-kapal layar tidak diperbolehkan untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Korea Selatan sehingga mengganggu jalannya perputaran uang yang rutin terjadi di pelabuhan-pelabuhan, (7) *Punishment in case of violations*, CNTA juga mengancam dan mengumumkan bahwa akan ada hukuman bagi setiap individu atau grup yang melanggar garis pedoman itu akan di hukum dengan selayaknya. Dengan ditegaskannya garis pedoman yang diumumkan oleh CNTA maka tentu saja akan berdampak berat kepada tingkat turis-turis Cina yang berwisata ke negara Korea Selatan.

Akibat dari edaran tujuh garis panduan bepergian oleh CNTA, jumlah wisatawan Cina ke Korea Selatan mengalami penurunan drastis. Pada data wisatawan Cina ke Korea Selatan yang penulis sadur dari Korea Tourism Organization (KTO), menunjukkan bahwa terdapat penurunan drastis pada bulan Maret 2017 dengan total jumlah wisatawan sebanyak 360.782 jiwa. Dimana pada bulan sebelumnya yaitu Februari 2017 total jumlah wisatawan sebanyak 590.790 jiwa. Penurunan angka tersebut merupakan penurunan yang drastis karena pada tahun sebelumnya, yaitu pada bulan Maret 2016 total jumlah wisatawan sebanyak 601.671 jiwa. Hal tersebut membuat penurunan angka wisatawan pada bulan Maret 2017 menjadi 40%.

Selain di bidang travel wisata, boikot yang dilakukan oleh Cina berdampak juga pada perusahaan retail Korea Selatan. Perusahaan retail besar Lotte, yang memasok lahan untuk pemasangan THAAD mendapat dampak yang besar. Pada Maret 2017, pemerintah Cina menutup sementara 75 toko Lotte di seluruh Cina (Zhang, 2017). Hal yang dipertaruhkan oleh perusahaan Lotte cukup tinggi, yang mana telah berinvestasi lebih dari 10 triliun won atau 8.7 milyar USD dalam bisnis yang beroperasi di Cina semenjak tahun 1994. Bisnis yang dimiliki oleh perusahaan

Lotte mencangkup banyak industri, termasuk industri makanan, hotel, kimiawi dan *real estate*. Perusahaan juga kurang lebih mempekerjakan sebanyak 20.000 orang di Cina, suatu pasar yang bertanggungjawab akan setidaknya sebanyak 30% dari penjualannya diluar wilayah Korea Selatan (Mullen & Sol, 2017).

Korea Utara melihat keputusan Korea Selatan untuk memasang sistem THAAD sebagai provokasi dan tindakan agresi. Pada bulan Februari 2016, Korea Selatan menghentikan sementara kegiatan di Kaesong Industrial Complex (KIC) yang merupakan sebuah taman industri kelolaan bersama antara dua Korea. Proyek ini dibentuk pada tahun 2004 sebagai bentuk kerja sama dalam perjanjian perdamaian. Korea Selatan mengatakan tujuan dibentuknya KIC adalah untuk meningkatkan taman industri dimana perusahaan-perusahaannya dapat membuat produk pabrikan dengan tenaga kerja Korea Utara (BBC News, 2016). Harapan dibentuknya proyek ini akan membantu Korea Utara memulai mereformasi ekonominya yang dalam kondisi buruk, serta mengurangi ketegangan antara dua Korea.

Penutupan KIC pada Februari 2016 merupakan insiden penting bagi keduanya karena itu adalah titik terahir dari perjanjian perdamaian antara dua Korea. Penyebaran THAAD meningkatkan resiko perang di Semenanjung Korea dan menjadi medan perang dalam konflik antara Amerika Serikat yang bersekutu dengan Korea Selatan dan Cina yang bersekutu dengan Korea Utara (Kwon, 2016). Penyebaran THAAD dipandang memiliki dampak negatif pada kekuatan militer Cina, di mana Korea Utara bergantung pada perlindungannya. Hal tersebut dapat membahayakan Korea Utara karena dapat kehilangan hubungan dengan Cina dan menjadi terasing dari masyarakat global. Dengan begitu tinggi pula peluang invasi dan penggunaan senjata nuklir ke Korea Selatan. Terlepas dari terjadi perang atau tidak, peluang tinggi untuk invasi akan berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi Korea Selatan. Para investor asing akan enggan berkomitmen dengan negara yang sedang dalam kondisi yang berbahaya seperti itu.

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, dirangkum, dan dianalisa oleh penulis, kesimpulan yang dapat diambil mengenai analisis proses perubahan kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam pemasangan THAAD terdiri dari beberapa alasan. Diawali dengan tekanan dari domestik yang menolak pemasangan karena beberapa masalah. Permasalahan yang muncul dalam ranah domestik termasuk pencemaran lingkungan, warga sekitar terkena dampak radiasi, hilangnya lahan warga yang digunakannya untuk peletakan sistem, hingga polusi suara yang ditimbulkan dari alat-alat dan bagian-bagian dari mesin THAAD. Lalu berkaitan dengan hubungan Korea Selatan dengan negara satu regional yaitu Cina. Akibat dari rencana pemasangan sistem THAAD, Cina melakukan boikot terhadap beberapa bidang ekonomi padahal keduanya sangat erat hubungannya dalam bidang tersebut. Boikot yang dilakukan mencakup perdagangan tingkat retail dan toko *duty-free*, barang setengah jadi, pariwisata, dan budaya pop.

Selanjutnya berkaitan dengan hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara. Pemasangan sistem THAAD memang bertujuan untuk menghalau rudal dari Korea Utara yang beberapa kali diujicobakan. Namun, kedua negara ini sendiri memiliki usaha bersama yang tidak berkaitan dengan militer. Usaha bersama tersebut bernama Kaesong Industrial Complex (KIC) yang merupakan sebuah taman industri kelolaan bersama antara dua Korea. Namun KIC ditutup pada bulan Februari 2016 setelah kerja sama yang terjadi antara Korea Selatan – Amerika mengenai sistem THAAD. Penutupan tersebut merupakan insiden penting bagi keduanya karena itu adalah titik terakhir dari perjanjian perdamaian antara dua Korea.

Dengan adanya alasan-alasan tersebut, sudah cukup membuat Korea Selatan ingin memperbaiki hubungan dalam ranah ke dalam yaitu domestik dan hubungan dengan negara-negara lain yang sudah lama dimiliki sejak lama. Tindakan Korea Selatan yang menghentikan sementara pemasangan THAAD sudah dapat mengurangi ketegangan dengan Cina. Boikot yang dilakukan oleh Cina juga sudah ditarik dan kegiatan ekonomi dengan Korea Selatan berjalan dengan baik kembali.

REFERENSI

- BBC News, 2016. "North Korea 'fires three ballistic missiles into sea'" [online]. Dalam <https://www.bbc.com/news/world-asia-37241649> [Diakses 10 Juli 2019]
- Diaz, A., & Zhang, S., 2017. "Angered by U.S. anti-missile system, China takes economic revenge" [online]. Dalam <https://www.cbsnews.com/news/china-retaliates-south-korea-us-thaad-missile-defense-lotte-and-k-pop/> [Diakses 10 Juli 2019]
- Easley, L.-E., 2017. "China's Charm Offensive on South Korea Is Starting to Work" [online]. Dalam <http://foreignpolicy.com/2017/11/13/chinas-charm-offensive-on-south-korea-is-starting-to-work/> [Diakses 13 Juli 2019]
- Hancocks, P., & Berlinger, J., 2017. "Missile defense system that China opposes arrives in South Korea" [online]. Dalam <https://edition.cnn.com/2017/03/06/asia/thaad-arrival-south-korea/index.html> [Diakses 5 Maret 2019]
- Institute for Security and Development Policy, 2017. "THAAD on the Korean Peninsula" [online]. Dalam isdpa.org/content/uploads/2016/11/THAAD-Background-2.pdf [Diakses 16 Juli 2019]
- Kim, N.-i., 2016. "Poll: 56% of South Koreans support THAAD deployment, 31% opposed" [online]. Dalam http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/756532.html [Diakses 19 Juli 2019]
- Kim, O.-h., 2017. "THAAD issue pushes South Korea-China relations to new lows" [online]. Dalam http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/807986.html [Diakses 10 Juli 2019]
- Klingner, B., 2015. "Why South Korea Needs THAAD" [online]. Dalam <http://isdpa.org/content/uploads/publications/2015-klingsner-why-south-korea-needs-thaad-missile-defense.pdf> [Diakses 16 Juli 2019]
- Kwon, H., 2016. "과연 누구를 위한 '사드'인가?" [online]. Dalam http://amn.kr/sub_read.html?uid=25182§ion=sc22 [Diakses 19 Juli 2019]
- Maeil Gyeongje., 2016. "Storm after THAAD: All high-level Sino-South Korean military talks" [online]. Dalam <http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2016&no=772534> [Diakses 8 Februari 2019]
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2016. "Ministry of Foreign Affairs spokesperson Hua Chunying's response to the question on whether China delivered its position to the US and ROK's official initiation of their discussion to deploy THAAD system" [online]. Dalam https://www.fmprc.gov.cn/web/wjdt_674879/fyrbt_674889/t1339470.shtml [Diakses 25 Mei 2019]
- Mullen, J., & Sol, H., 2017. "One company is bearing the brunt of China's anger over U.S. missile system" [online]. Dalam <https://money.cnn.com/2017/03/07/news/china-lotte-thaad-south-korea-tensions/index.html> [Diakses 25 Mei 2019]

- Snyder, R. C., Bruck, H. W., & Sapin, B. (1961). The Decision-Making Approach to the Study of International Politics. In J. N. Rosenau, *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory* (pp. 199-206). New York: The Free Press of Glencoe, Inc.
- Suastha, R. D., 2017. "Dikerahkan Tanpa Izin, Korsel Tangguhkan Penempatan THAAD" [online]. Dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170607153534-113-220077/dikerahkan-tanpa-izin-korsel-tangguhkan-penempatan-thaad> [Diakses 25 Mei 2019]
- Yonhap News Agency, 2016. "Half of S. Koreans support THAAD deployment: poll" [online]. Dalam <https://en.yna.co.kr/view/AEN20160715004800315> [Diakses 10 Juli 2019]
- Young-jun, Y., 2016. "Embassy reception used to host ministers and vice ministers, but" [online]. Dalam <https://news.joins.com/article/20957953> [Diakses 10 Juli 2019]
- Zhang, A. D., 2017. "Angered by U.S. anti-missile system, China takes economic revenge" [online]. Dalam <https://www.cbsnews.com/news/china-retaliates-south-korea-us-thaad-missile-defense-lotte-and-k-pop/> [Diakses 16 Juli 2019]